



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL  
TAHUN 2021 – 2024

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

KELOMPOK SASARAN: MASYARAKAT UMUM

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	18.344	20.178	22.196	Pusat	Kemendikbud ristek	Ditjen Diksi, Dit. Kursus dan Pelatihan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
2.	KKN Mahasiswa	Jumlah desa dampingan	20.000	20.000	20.000	58 PTKIN	Kemenag	Pemda, Kemendes PDTT
3.	Tenaga Kerja Terampil Mengelola Koperasi Pekerja dan Usaha Produktif	Jumlah tenaga kerja yang mengelola koperasi	800	900	1.000	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker, Apindo
4.	Penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis SKKNI	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	473	473	473	SMK kadipaten (Jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari	KLHK	Kemendikbud ristek, Kemenaker
5.	Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi (desa)	2.500	3.500	4.500	Desa di sekitar kawasan konservasi	KLHK	Kemendagri, Kemendes

6. SDM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
6.	SDM Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilatih tentang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	SDM pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi yang melaksanakan kebijakan KGPA (PLUT, Mekaar, pendamping desa, PPL, dll)	2.500	2.000	2.000	34 Provinsi	Kemen PPPA	

KELOMPOK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELOMPOK SASARAN: CALON WIRAUSAHA

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	Jasa Inkubasi Teknologi (PNBP)	Jumlah <i>tenant</i> PPBT yang menerima Jasa Inkubasi Teknologi (PNBP)	4	4	4	Puspiptek, Serpong	BPPT	BRIN
2.	Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Nasional	Jumlah Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Nasional	1	1	1	5 Kampus: Jabar, Sumbar, Maluku, Papua, Jatim	Kemen Investasi/ BKPM	Universitas, DPM PTSP
3.	Mahasiswa menjalankan Wirausaha	Jumlah Mahasiswa menjalankan wirausaha	3.630	3.993	4.392	Pusat	Kemendikbud ristek	Ditjen Diksi, Dit. Belmawa
4.	Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Jumlah masyarakat yang disertifikasi	200	300	400	Pusat	Kemen ESDM	
5.	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Jumlah Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	800	825	850	Pusat	Kemen ESDM	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
6.	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat subsektor mineral dan batubara	Jumlah usaha yang dibina	2.507	2.341	2.380	Pusat	Kemen ESDM	
7.	Pengembangan program kemitraan untuk tambang mineral aluvial	Jumlah perizinan di bidang jasa usaha pertambangan yang dikeluarkan	25	30	35	Pusat	Kemen ESDM	
8.	Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	Jumlah Peserta Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	200	220	260	Pusat	Kemen ESDM	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Asosiasi Subsektor Geominerba



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
9.	Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	Jumlah Peserta Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara yang mendukung UMKM	120	120	120	Pusat	Kemen ESDM	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Asosiasi Subsektor Geominerba
10.	Penumbuhan Kewirausahaan anggota koperasi	Jumlah anggota koperasi yang menjadi Wirausaha	200	200	200	10 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenkominfo, Kemen BUMN
11.	Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemen Investasi/BKPM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
12.	Dunia Pendidikan yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan	Jumlah Dunia Pendidikan yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan	20 PT/ 600 WP	25 PT/ 750 WP	30 PT/ 900 WP	34 Provinsi	Kemen KUKM	Badan Usaha, Asosiasi, Pemda, Perguruan Tinggi
13.	Calon Wirausaha ( <i>Startup</i> ) yang difasilitasi Inkubasi	Jumlah Calon Wirausaha ( <i>Startup</i> ) yang difasilitasi Inkubasi	300	350	350	34 Provinsi	Kemen KUKM	Perguruan Tinggi, BRIN, Kemendikbud ristek
14.	Penyelenggaraan pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan Wirausaha	Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan Wirausaha	1.200	1.500	1.500	33 Provinsi	KLHK	Kemenaker, Kemenperin, BNSP

15. Gerakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
15.	Gerakan Usaha Kreatif	Jumlah Gerakan Usaha Kreatif (Orang)	2.000	2.000	2.000	5 DSP, Bali dan Provinsi lainnya sesuai Potensi Daerah	Kemenparekraf /Baparekraf	Pemda
16.	Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah penganggur /setengah penganggur yang dibina menjadi calon wirausaha	50.000	52.000	54.000	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker
17.	Talenta Muda	Jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan menjadi calon Wirausaha	185	194	204	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker
18.	Sertifikasi Wirausaha baru	Jumlah calon wirausaha yang mendapatkan sertifikasi Wirausaha baru	120	150	150	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
19.	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan di kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	Jumlah Wirausaha di kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang difasilitasi	20	20	20	33 Provinsi	Kemendes PDDT	Pemda
20.	Pelaku Usaha Obat Tradisional yang difasilitasi dan dibina: Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Obat Tradisional (komponen)	Jumlah pelaku usaha obat tradisional yang difasilitasi dan dibina	130	140	150	Sumut (2), Sulut, NTT, Jatim (2), Jateng, DKI Jakarta, Sumsel, Kalsel	Kemenkes	DPRD, Dinas Kesehatan/ pimpinan daerah setempat (lurah, camat)
21.	Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Pendaftaran NIB oleh Calon Wirausaha	2.550	2.700	3.000	Pusat	Kemenperin	Pemda

22. Fasilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
22.	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Melalui Dana Dekonsentrasi	Pendaftaran NIB oleh Calon Wirausaha	2.000	2.100	2.200	Dekon	Kemenperin	Pemda
23.	Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Bekerjasama dengan Pondok Pesantren	Pendaftaran NIB Oleh Kelompok Usaha / Unit Bisnis di Pondok Pesantren	27	27	27	Pusat	Kemenperin	Pemda dan Pondok Pesantren
24.	KPM yang mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah KPM yang mendapatkan pendampingan usaha	8.000	8.000	8.000	34 Provinsi	Kemensos	Inkubator PT, Dinas Koperasi, Perbankan
25.	IPTEK LIPI Termanfaatkan Oleh UKM/Masyarakat	IPTEK LIPI Termanfaatkan Oleh UKM/Masyarakat	10	10	10	Jawa Barat	LIPI	Kemenperin, Kemen KUKM

KELOMPOK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

KELOMPOK SASARAN: WIRAUSAHA PEMULA

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh BB/BPOM	Jumlah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	842	910	978	34 Provinsi	BPOM	Kemen KUKM (Unit PLUT), KKP, Kementan, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kemenperin, Kemendag, Kemendagri, Perbankan (BNI), Pemda Kab/Kota (Dinkes)

2. UMKM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
2.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM I	Jumlah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	106	146	186	34 Provinsi	BPOM	KKP, Kemenkes, Kemendag, Kemenperin, Kemen KUKM, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
3.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM II	Jumlah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	51	72	93	34 Provinsi	BPOM	Kemenko Ekon, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemenkes, Kementan, Kemen Investasi/BKPM, Kemendag, Pemda Provinsi dan Kab/Kota

4. Inkubasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
4.	Inkubasi Teknologi Produk- Produk Inovasi Dalam Negeri	Jumlah PPBT	10	10	10	Puspiptek, Serpong	BPPT	BRIN, Kemen KUKM, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kemenkominfo, Kementan, BSN, BPOM
5.	Membina Usaha Mikro dan Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas (membaik secara bisnis dan ekonomi)	5% dari jumlah UMK baru Binaan BUMN pada tahun berjalan	5% dari jumlah UMK baru Binaan BUMN pada tahun berjalan	5% dari jumlah UMK baru Binaan BUMN pada tahun berjalan	Wilayah BUMN	Kemen BUMN	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
6.	Mahasiswa menjalankan Wirausaha	Jumlah Mahasiswa menjalankan Wirausaha	900	1.000	1.100	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. PTVP
7.	Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi	Jumlah Peserta Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi	400	500	600	Pusat	Kemen ESDM	Disnaker Kab/Kota
8.	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	Jumlah Badan Usaha Kegiatan Pemroduksian pada sumur tua	1	1	1	Pusat	Kemen ESDM	
9.	Dunia Usaha dan Industri yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan	Jumlah Dunia Usaha dan Industri yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan	6 Badan Usaha / 300 WP	7 Badan Usaha / 350 WP	8 Badan Usaha / 400 WP	21 Provinsi	Kemen KUKM	Badan Usaha, Asosiasi, Pemda, Perguruan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
10.	Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	Tercapainya Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	2000	2000	2500	34 Provinsi	Kemen KUKM	30 K/L
11.	Lembaga Inkubator Wirausaha yang dikembangkan	Jumlah Lembaga Inkubator Wirausaha yang dikembangkan	20 L/ 600 WP	25 L/ 750 WP	25 L/ 750 WP	34 Provinsi	Kemen KUKM	Perguruan Tinggi, BRIN, Kemendikbud ristek
12.	Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif	Jumlah Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif	5.000	10.000	10.000	34 Provinsi	Kemen KUKM	Lembaga Pembiayaan Perbankan dan Non Perbankan, Bursa Efek, OJK, <i>Angel Investor</i>
13.	<i>Start-Up</i> yang difasilitasi Akses Investasi	Jumlah <i>Start-Up</i> yang difasilitasi Akses Investasi	50	50	50	34 Provinsi	Kemen KUKM	Kemen Investasi/ BKPM, Perbankan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
14.	UKM/ <i>Start-Up</i> yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis	Jumlah UKM/ <i>Start- Up</i> yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis	6.000	6.700	7.400	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
15.	<i>Start-Up</i> yang diperluas rantai pasok	Jumlah <i>Start-Up</i> yang diperluas rantai pasok	120	140	160	34 Provinsi	Kemen KUKM	DU/DI, Lembaga Perbankan
16.	Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	23.000	23.000	23.000	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenkeu, Kemen ATR/BPN, BUMN

17. Usaha . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
17.	Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk	1.000	1.000	1.000	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, BSN, BPOM
18.	Usaha Mikro yang difasilitasi Penyusunan <i>E-Catalogue</i> untuk berpartisipasi dalam Laman Situs Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Penyusunan <i>E-Catalogue</i> untuk berpartisipasi dalam Laman Situs Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	250	250	250	34 Provinsi	Kemen KUKM	LKPP



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
19.	Usaha Mikro Bidang Kuliner (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan	Jumlah Usaha Mikro Bidang Kuliner (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan	500	500	500	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, DU/DI
20.	Usaha Mikro Berbasis Kompetensi yang menerima pelatihan	Jumlah Usaha Mikro Berbasis Kompetensi yang menerima pelatihan	360	360	360	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
21.	Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	Jumlah Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	3.250	3.250	3.250	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
22.	Penumbuhan <i>Start-Up</i> Berbasis Koperasi	Jumlah <i>start up</i> berbasis Koperasi yang terbentuk	50	50	50	10 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenkominfo, Kementerian BUMN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
23.	Pelatihan dan <i>Coaching</i> Bisnis Perkoperasian	Jumlah pengelola dan anggota Koperasi yang mendapatkan <i>coaching</i> bisnis	1.000	1.200	1.200	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
24.	UKM/ <i>Start Up</i> yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah UKM/ <i>Start Up</i> yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika	500	580	650	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
25.	Kemitraan Usaha <i>Start Up</i> yang diperluas dan dibentuk	Jumlah <i>Start Up</i> yang diperluas dan dibentuk melalui Kemitraan Usaha	60	65	70	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, DU/DI

26. Kelompok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
26.	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas <i>Gold</i> / <i>Platinum</i>	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang kelasnya naik menjadi <i>Gold</i> / <i>Platinum</i>	200	250	300	33 Provinsi	KLHK	Kemendagri, Kemen KUKM, Kemendes PDTT, BUMN, Kementan, Kemenparekraf/ Baparekraf
27.	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat/pemilikan legalitas kayu	150	100	100	Provinsi Seluruh Jawa, Sumatera Wilayah Bagian Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara,	KLHK	Kemen KUKM, Kemendagri, Kemenperin, dan Dinas Provinsi Bidang LHK



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
						Maluku, Bali, dan NTB		
28.	Pengembangan SDM Ekraf Mandiri melalui Wirausaha di Destinasi	Jumlah Pengembangan SDM Ekraf Mandiri melalui Wirausaha di Destinasi (Orang)	1.000	1.000	1.000	5 DSP, Bali dan Provinsi lainnya sesuai Potensi Daerah	Kemenpa rekraf/ Baparekraf	
29.	Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	Jumlah Calon Wirausaha hasil binaan TKM yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis/ pendampingan	3.000	3.120	3.240	Pusat	Kemenaker	Pemda, Disnaker

30. Dokumen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
30.	Dokumen Kerjasama wirausaha baru dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)	Jumlah dokumen kerjasama antara wirausahawan dan DU/DI	5	6	7	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker, Apindo
31.	Pelaku Usaha UMKM yang Mengikuti Pembinaan di Bidang Distribusi Tidak Langsung	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi dan pembinaan	200	200	200	Provinsi Jawa Barat dan Banten	Kemendag	Dinas Perdagangan Prov/Kab/Kota, Ritel modern
32.	Pelaku Usaha UMKM yang Mengikuti Pembinaan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi dan pembinaan	240	240	240	Solo dan Magelang	Kemendag	Dinas Perdagangan Prov/Kab/Kota
33.	Promosi dan Pendampingan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi IKM	Serapan KUR untuk IKM	1.000	1.000	1.000	Pusat	Kemenperin	Pemda
34.	<i>Indonesia Food Inovation</i>	Jumlah IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi	20	20	20	Pusat	Kemenperin	Asosiasi dan Perguruan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
35.	Memberi Bimbingan, Sertifikasi Produk dan Kompetensi, dan Pengembangan Produk Melalui Bali <i>Creative Industry Center</i>	Jumlah IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi	20	20	20	Pusat	Kemenperin	Asosiasi dan Perguruan Tinggi
36.	Penumbuhan dan Pengembangan Startup IKM Berbasis Teknologi ( <i>Startup Industry</i> )	Jumlah IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi	20	20	20	Pusat	Kemenperin	Asosiasi dan Perguruan Tinggi
37.	Pengembangan IKM Percepatan Melalui Balai Pengembangan Industri Percepatan Indonesia (BPIPI)	Jumlah IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi	4	4	4	Pusat	Kemenperin	Asosiasi dan Perguruan Tinggi
38.	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	Jumlah <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis	3	3	3	Jakarta, Yogyakarta, Denpasar	Kemenperin	BDI Jakarta, BDI Yogyakarta, dan BDI Denpasar



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
39.	Calon Wirausaha Industri Lulusan Diklat Berbasis Kompetensi Wirausaha Industri	Jumlah Wirausaha	25	25	25	Jakarta	Kemenperin	BPSDMI
40.	Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan	Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan	500	500	500	34 Provinsi	Kemenpora	Dispora
41.	Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	Jumlah Wirausaha Muda Pertanian yang ditumbuhkan	1.641	1.513	1.520	a. Politeknik Pembangun an Pertanian (Polbangtan ): (Medan, Bogor, Yogyakarta- Magelang, Malang,	Kementan	Kemendikbud ristek





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
						Gowa, Manokwari) b. Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI), dan c. SMK-PP (Sembawa- Sumatera Selatan, Banjarbaru- Kalimantan Selatan, Kupang- Nusa Tenggara Timur)		

42. Pelatihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
42.	Pelatihan dan Fasilitasi Penumbuhan Petani Milenial	Jumlah peserta pelatihan	2.000	2.000	2.000	UPT lingkup BPP BPPSDMP	Kementan	Kemendikbud ristek
43.	Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Jumlah Orang (Pemuda Perdesaan) yang didukung dan dilatih untuk mengembangkan usaha	15.000	19.300	13.000	Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan	Kementan	K/L, Pemda, Perbankan, Perguruan Tinggi, Kelompok Tani
44.	Bantuan Premi Asuransi Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang disalurkan	Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan Skala Kecil yang menerima bantuan Premi Asuransi	7.500	9.000	10.000	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
45.	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	43.000	44.000	45.000	Berdasarkan lokasi program KKP dan Kab/Kota lain lokasi penugasan Penyuluh Perikanan	KKP	Dinas Kab/Kota yg menangani kelautan dan perikanan
46.	Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Jumlah kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	2.550	2.750	3.000	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda

47. UMKM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
47.	UMKM yang Dibina dalam Inkubator Bisnis	Jumlah UMKM yang dibina dalam Inkubator Bisnis	24	28	32	Berdasarkan hasil seleksi tim inkubasi bisnis BBP3KP	KKP	Pemda
48.	Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	Jumlah Wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan (Wirausaha)	300	400	500	Pusat	KKP	Dinas Kab/Kota/ Prov, Kemen KUKM
49.	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Jumlah nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	4.000	5.000	5.000	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda
50.	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Jumlah Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.500	1.500	1.500	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
51.	<i>Digital technopreuner</i>	Jumlah <i>startup</i> aktif yang terbentuk ( <i>startup</i> )	90	120	150	Seluruh Indonesia via <i>online</i>	Kemen kominfo	Praktisi, pelaku industri, pemerintah dan <i>venture capital</i>
52.	Fasilitasi <i>Business Matchmaking Startup Digital</i>	Jumlah <i>startup</i> digital yang difasilitasi <i>business matchmaking</i>	50	50	50	Seluruh Indonesia	Kemen kominfo	Praktisi, pelaku industri, pemerintah, dan <i>venture capital</i>
53.	Pelatihan SDM bidang TIK	Jumlah Peserta Pelatihan digital <i>Skill</i> (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital (peserta)	22.000	22.000	22.000	Seluruh Indonesia	Kemen kominfo	Perusahaan TIK Global

54. Fasilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
54.	Fasilitasi <i>Scaling up</i> UMKM	Jumlah UMKM (produsen) yang naik kelas dari UMK menjadi usaha menengah	22.000	33.000	44.000	10 Kawasan Pariwisata Prioritas	Kemen kominfo	Kemen KUKM Kemen BUMN (Rumah BUMN), Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kemenko Marves, Dinas KUKM, <i>Platform Digital</i> (Media Sosial, <i>e-Commerce</i> , <i>Fintech</i> , dan teknologi 4.0 lainnya), Perbankan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
55.	Usaha Mikro yang dikembangkan melalui Pendekatan klaster/Komoditas	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan melalui Pendekatan klaster/Komoditas	362	362	362	34 Provinsi	KUKM	Pemda, DU/DI
56.	Hasil Pembinaan Perusahaan Rintisan Terdepan	Hasil Pembinaan Perusahaan Rintisan Terdepan	75	75	75	Jawa Barat	LIPI	Kemenperin, Kemen KUKM
57.	Strategi Pengembangan Pelaku Usaha dalam PBJP	Jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	375	375	375	Pusat	LKPP	Kemen KUKM, Dinas KUKM, Asosiasi Pelaku Usaha, Pelaku Usaha, Praktisi

KELOMPOK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

KELOMPOK SASARAN: WIRAUSAHA MAPAN

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	Bimbingan teknis kepada Badan Usaha	Jumlah UMKM yang menerima bimbingan teknis, pendampingan dan pengujian sertifikasi	200	250	300	Jakarta	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
2.	Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas	Jumlah Badan Usaha yang diawasi Kegiatan Usaha Pengangkutan Migasnya	1.477	1.477	1.477	Pusat	Kemen ESDM	
3.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	Jumlah Badan Usaha pada Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas yang dibina dan diawasi	20	20	20	Pusat	Kemen ESDM	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
4.	Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	Jumlah Perusahaan dalam rangka mendorong investasi besar bermitra dengan UMKM	70	70	70	34 Provinsi	Kemen Investasi/ BKPM	DPM PTSP Prov/Kab/Kota, Kemen KUKM, Asosiasi
5.	Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	Tercapainya Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	500	550	600	34 Provinsi	Kemen KUKM	30 K/L
6.	UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan	Jumlah UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan	250	370	430	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Pemda, Lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan
7.	UKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak	Jumlah UKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak	300	360	420	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Kemenkeu, Kemen Investasi/ BKPM

8. UKM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
8.	UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Usaha Produktif	Jumlah UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Usaha Produktif	2.000	2.200	2.400	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
9.	UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Sertifikasi	Jumlah UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Sertifikasi	175	200	250	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
10.	UKM/Sentra yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok	Jumlah UKM/Sentra yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok	225	255	274	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Pemda, Lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan, DU/DI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
11.	UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk	Jumlah UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk	660	720	780	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Pemda, BSN
12.	UKM/Sentra yang difasilitasi Penelitian dan Pengembangan Produk	Jumlah UKM/Sentra yang difasilitasi Penelitian dan Pengembangan Produk	60	70	80	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Pemda, BRIN
13.	Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang diperluas dan dibentuk	Jumlah UKM yang melakukan ekspor	185	210	235	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenlu, Kemendag
14.	Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk	Jumlah UKM yang melakukan Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk	160	170	180	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, DU/DI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
15.	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	Jumlah UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	290	330	370	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Kemenkominfo, Pemda
16.	Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat	Jumlah UKM yang melakukan pemasaran ekspor	6	6	8	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenlu, Kemendag
17.	Fasilitasi Promosi Produk Koperasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Koperasi yang melakukan pemasaran ekspor	50	50	50	5 Provinsi, 1 Negara	Kemen KUKM	Kemendag, Kemenperin, Kemenlu
18.	Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	Tercapainya Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	-	500	500	34 Provinsi	Kemen KUKM	30 K/L

19. Perusahaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
19.	Perusahaan yang mendapatkan sertifikasi kelembagaan, keahlian, dan SMK3 (perusahaan)	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan SMK3 (perusahaan)	5.000	5.000	5.000	34 Provinsi	Kemenaker	Pemprov, Disnaker, Apindo
20.	Badan usaha yang mendapatkan penghargaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang berperan mempekerjakan penyandang disabilitas	25	25	25	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Dinsos, Apindo
21.	Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3, lingkungan kerja dan <i>hygiene</i> perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat layanan Uji K3	4.950	5.445	5.990	5 lokasi	Kemenaker	Pemda, Apindo

22. Fasilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
22.	Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan	Jumlah UKM yang mendapat fasilitasi peningkatan Kewirausahaan	1.250	1.250	1.250	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Asosiasi, UKM
23.	Fasilitasi Kemitraan Pemasaran	Jumlah UKM yang mendapat fasilitasi kemitraan pemasaran	1.000	1.000	1.000	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Asosiasi, UKM, <i>Marketplace</i>
24.	Fasilitasi Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	Jumlah UKM yang mendapat fasilitasi bantuan sarana usaha perdagangan	750	750	750	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Asosiasi, Pedagang, Pemilik Warung Kelontong

25. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
25.	Pengembangan Produk Ekspor, Jasa, dan Ekonomi Kreatif	Jumlah UKM yang menerima Pendampingan Pengembangan produk, Jasa, dan Ekonomi Kreatif	35	40	45	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, pelaku usaha
26.	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	3.677	3.777	3.877	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Perbankan, bea cukai, perusahaan logistik, asuransi
27.	<i>Export Coaching</i> Program	Jumlah Pelaku Usaha Peserta <i>Export Coaching</i> Program	150	175	200	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Perguruan Tinggi, perbankan, Bea Cukai

28. Misi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
28.	Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi melalui misi dagang ke negara utama	60	70	80	Amerika Serikat, Eropa Barat, Vietnam, Jepang, Australia	Kemendag	Kemenperin, Kemenlu, BKPM, Kemenko Ekon, Dinas Perdagangan Prov/Kab/Kota
29.	Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (Kegiatan promosi)	30	35	40	Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Eropa Timur	Kemendag	Kemenperin, Kemenlu, BKPM, Kemenko Ekon, Dinas Perdagangan Prov/Kab/Kota





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
30.	Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah penerima manfaat kerjasama pengembangan ekspor	110	120	130	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Pelaku Usaha
31.	Pelaku Usaha yang Mengikuti Pembinaan di Bidang Jasa Perdagangan Distribusi dan Bisnis	Jumlah badan usaha yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan	400	400	400	Pusat	Kemendag	ATR BPN, BKPM, Dinas Perdagangan setempat, Jasa Konstruksi PUPR, Asosiasi, Kemenkeu, Kemenaker
32.	Fasilitasi <i>Membership</i> IKM <i>Go Global</i> Bagi IKM PBKF	Jumlah IKM yang memperoleh <i>membership</i> <i>ecommerce ekspor</i> ( <i>verified</i> )	10	10	10	Pusat	Kemenperin	IKMA, LMLA, Asosiasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
33.	Peningkatan Investasi dan Ekspor Sektor Industri Aneka	Jumlah IKM yang memperoleh <i>membership ecommerce ekspor (verified)</i>	10	10	10	Pusat	Kemenperin	IKMA, KSKIA, Asosiasi
34.	Fasilitasi Membership IKM <i>Go Global</i> Bagi IKM LMEA	Jumlah IKM yang memperoleh <i>membership ecommerce ekspor (verified)</i>	2	2	2	Pusat	Kemenperin	IKMA, LMEA, Asosiasi
35.	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Melalui Dana Dekonsentrasi	Sertifikat Bagi IKM	600	600	600	Dekon	Kemenperin	IKMA, Dekon, Pemda

36. IKM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
36.	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Sertifikat produk IKM	200	200	200	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi, Pemda
37.	Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Fasilitas <i>Esmart</i> IKM	IKM yang memanfaatkan penjualan <i>online</i>	1.000	1.000	1.000	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi
38.	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Promosi dan Pameran dimanfaatkan IKM	130	131	131	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi

39. IKM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
39.	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	IKM yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan	40	40	40	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi, Pemda
40.	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Sertifikat produk IKM	200	200	200	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, Pemda
41.	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas <i>Esmart</i> IKM	IKM yang memanfaatkan penjualan <i>online</i>	1.000	1.000	1.000	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, Pemda



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
42.	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	Promosi dan Pameran dimanfaatkan IKM	98	98	98	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, Pemda
43.	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	IKM yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan	38	38	38	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, Pemda
44.	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Sertifikat produk IKM	200	200	200	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, Pemda



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
45.	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi <i>Esmart</i> IKM	IKM yang memanfaatkan penjualan <i>online</i>	500	500	500	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, Pemda
46.	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	Promosi dan Pameran dimanfaatkan IKM	70	65	72	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, Pemda
47.	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	IKM yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan	15	15	16	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, Pemda

48. Layanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
48.	Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Desain, dan Kemasan	IKM yang memanfaatkan perbaikan kemasan dan perlindungan merk	400	400	400	Pusat	Kemenperin	Asosiasi, Pemda
49.	Pengembangan IKM Persepatuan Melalui Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)	IKM alas kaki yang mendapatkan bimbingan teknis	100	100	100	Sidoarjo	Kemenperin	IKMA BPIPI, Asosiasi, Pemda
50.	Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha	Jumlah pengelola/wirausaha industri olahraga yang mendapat pengetahuan/bimtek tentang industri olahraga	500	500	500	34 Provinsi	Kemenpora	Dispora

51. UMKM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
51.	UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi	65	70	75	Pusat	KKP	BUMN, perusahaan yang memiliki CSR, Pemda
52.	UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	3.945	4.895	4.995	Pusat	KKP	lembaga pembiayaan, Pemda
53.	Badan Usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan	Jumlah Badan Usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan	15	15	15	Koridor Logistik Hasil Perikanan	KKP	Kemenko Marves, Kemenhub, Pemda, PT. Pelindo, PT. Peln, <i>shipping line</i> swasta, <i>forwarder</i> swasta

EKOSISTEM . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

#### EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga yang berwirausaha	11,7	12,2	12,7	Pusat dan 34 Provinsi	BKKBN	Kemen KUKM, Kemensos, Kemendagri, Pemda
2.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	1	1	1	Surabaya	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
3.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat	1	1	1	Jawa Barat	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
4.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	1	1	1	Riau	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
5.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	1	1	1	Palembang	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
6.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	1	1	1	Makassar	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
7.	Membina Usaha Mikro dan Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri	Persentase penyaluran pendanaan UMK (D-h program kemitraan BUMN) untuk mendukung pelaksanaan TPB nomor 8	90% Dana Tersedia untuk pinjaman UMK dari BUMN tersalur kan	90% Dana Tersedia untuk pinjaman UMK dari BUMN tersalur kan	90% Dana Tersedia untuk pinjaman UMK dari BUMN tersalur kan	Wilayah BUMN	Kemen BUMN	

8. Koordinasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
8.	Koordinasi kebijakan pengadaan barang dan jasa dengan pelaku UMKM melalui Pasar Digital UMKM	Meningkatnya penggunaan produk KUKM oleh BUMN melalui pengadaan barang atau jasa BUMN (PaDi UMKM)	Kebijakan implementasi PaDi UMKM pada 75% dari jumlah BUMN dan anak perusahaan BUMN (ex-BUMN)	Kebijakan implementasi PaDi UMKM pada 100% dari jumlah BUMN dan anak perusahaan BUMN (ex-BUMN)	Kebijakan implementasi PaDi UMKM pada 100% dari jumlah BUMN dan anak perusahaan BUMN (ex-BUMN)	Wilayah BUMN	Kemen BUMN	
9.	Penilaian dan Penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	65	70	75	Pusat	Kemen ESDM	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
10.	Alokasi subsidi listrik	Jumlah energi yang disalurkan kepada golongan bisnis dan industri kecil dengan daya 450VA	483	516	548	Pusat	Kemen ESDM	
11.	Kemitraan Usaha Nasional	Jumlah Kemitraan Usaha Nasional	12	12	12	2021 : Papua, Kaltim, Jakarta	Kemen Investasi/ BKPM	DPM PTSP, Dinas Koperasi (Daerah)
12.	Partisipasi Expo Internasional	Partisipasi Expo Internasional	1	1	1	Lokasi Promosi	Kemen KUKM	Kemenlu
13.	Korporatisasi Pangan Melalui Koperasi	Jumlah Koperasi pangan yang dikembangkan	20	20	20	5 kawasan	Kemen KUKM	Kementan, KLHK, Kemendag, Bulog, Pemda

14. Fasilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
14.	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Produk Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk	50	50	50	10 Provinsi	Kemen KUKM	BSN, Kemendag, Kemenperin, Pemda
15.	Pendamping Bisnis UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pendamping Bisnis UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya	175	200	250	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda

16. Daerah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
16.	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Rentan	Persentase daerah yang memiliki program pemberdayaan ekonomi yang RG	7	7	6	25 Provinsi	Kemen PPPA	Pemda
17.	Lembaga Profesi dan Dunia Usaha (LPDU) yang difasilitasi dalam penguatan kebijakan KG, PHP, dan PA	Persentase LPDU yang berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA	5	8	10	Pusat	Kemen PPPA	K/L, Pemda

18. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
18.	Pemberdayaan masyarakat	Jumlah program bantuan	1.160	1.160	1.160	58 PTKIN	Kemenag	Kemendes PDTT, Pemda
19.	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah UMK yang bersertifikat halal	21.994	25.000	33.149	34 Provinsi	Kemenag	MUI, LPH, K/L, dan Dinas terkait
20.	Perusahaan yang melaporkan keadaan perusahaan pada Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	Jumlah perusahaan yang melaporkan diri ke WLKP Online dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan	76.000	77.000	78.000	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker, Apindo
21.	Pengembangan <i>market place</i> berorientasi ekspor	Jumlah Layanan <i>market place</i> (InaExport) berorientasi ekspor	1	1	1	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, KBRI, Kemenlu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
22.	Pameran <i>Trade Expo</i> Indonesia	Jumlah Pameran <i>Trade Expo</i> Indonesia	1	1	1	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kemenko Ekon, Kemenlu
23.	<i>Market Intelligence</i>	Jumlah <i>Market Intelligence</i>	23	24	25	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Kemenlu, KADIN

24. Layanan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
24.	Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor Melalui Intrade	Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan impor melalui Intrade (Layanan)	1	1	1	Pusat	Kemendag	Pelaku usaha, K/L pusat yang terkait pemberian rekomendasi perizinan (Kementan, Bea Cukai, Kemen ESDM, KKP)
25.	Promosi Produk Nusantara	Jumlah Promosi Produk Nusantara	3	3	3	Pusat, Regional Timur, Regional Barat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Asosiasi, UMKM
26.	Pengembangan Desain melalui <i>Indonesian Design Development Center</i>	Jumlah desain produk yang dikembangkan melalui IDDC	120	125	130	Pusat	Kemendag	Asosiasi Designer, Perguruan Tinggi

27. Daerah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
27.	Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah pada setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional	Jumlah Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi untuk memenuhi target kurang lebih 500.000 Wirausaha dalam rangka pencapaian rasio Kewirausahaan sebesar 4% dan penumbuhan Wirausaha sebesar 4% hingga 2024	34	34	34	34 Provinsi	Kemendagri	K/L pengampu yang terkait dengan Kewirausahaan, Pemerintah Provinsi
28.	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Jumlah BUMDesa Bersama Konsolidasi yang difasilitasi pengembangannya	62	62	62	62 KPPN	Kemendes PDDT	Dinas PMD Kabupaten

29. Fasilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
29.	Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	240	240	240	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. SMK
30.	Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkatkan	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri	945	1.046	1.143	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. Kursus dan Pelatihan
31.	Program studi dengan kurikulum berbasis kerjasama dengan dunia usaha/industri/QS 100 (Kampus Merdeka)	Jumlah Prodi dengan kurikulum berbasis kerjasama dengan dunia usaha/industri/QS 100 (Kampus Merdeka)	780	820	880	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. PTVP, Ditjen Dikti, Dit. Belmawa

32. Satuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
32.	Satuan Pendidikan Vokasi yang mengembangkan Kewirausahaan di DU/DI	Jumlah Satuan Pendidikan Vokasi yang mengembangkan Kewirausahaan di DU/DI	50	50	50	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. Mitras DU/DI
33.	Dunia Usaha/Dunia Industri yang menerapkan Kerjasama dengan Satuan Pendidikan Vokasi	Jumlah Kerja Sama dengan DU/DI	250	250	250	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. Mitras DU/DI

34. Kajian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
34.	Kajian Ekosistem Lembaga Keuangan Penyedia Pembiayaan Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah kajian	1	-	-	Pusat	Kemenkeu	OJK, Kemen KUKM, LPS, K/L yang memiliki program pemberdayaan UMKM, sektor keuangan, pelaku industri, dan masyarakat
35.	Pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif di destinasi pariwisata prioritas dan lokasi <i>Cultural Heritage Regeneration</i>	Jumlah lokasi pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif (Lokasi)	31	34	39	Pusat	Kemenparekraf /Baparekraf	Pemda

36. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> /Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
36.	Pengembangan <i>Be Creative District</i> (BCD)	Jumlah kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD) dikembangkan (Kawasan)	1	1	1	Jawa Barat dan Banten	Kemenparekraf /Baparekraf	Pemda
37.	Kerjasama Desa Wisata dengan Badan Usaha	Jumlah Kerjasama Desa Wisata dengan Badan Usaha (Kerjasama)	41	41	41	Pusat	Kemenparekraf /Baparekraf	Pemda
38.	Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif	Jumlah Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif (Kerjasama)	5	5	4	Pusat	Kemenparekraf /Baparekraf	

39. *Big . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
39.	<i>Big Data</i> Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan PDB, Ekspor, dan tenaga kerja (Publikasi/Laporan)	3	3	3	Pusat	Kemenparekraf /Baparekraf	
40.	Sentra IKM dan UPT Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Yang Mendapat Fasilitasi	Peningkatan daya saing Sentra IKM	17	20	22	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi, dan Pemda
41.	Sentra IKM dan UPT Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka Yang Mendapat Fasilitasi	Peningkatan daya saing Sentra IKM	10	12	15	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, dan Pemda



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
42.	Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Yang Mendapatkan Fasilitas	Peningkatan daya saing Sentra IKM	11	12	13	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, dan Pemda
43.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyusunan Rekomendasi Kebijakan mendukung Pengembangan IKM Ekspor, Kemitraan Usaha, dan Penerapan <i>Making</i> Indonesia 4.0	Rekomendasi Kebijakan (Rekomendasi)	1	1	1	Pusat	Kemenperin	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
44.	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan Kewirausahaan	1. Jumlah SKP yang terfasilitasi pengembangan Kewirausahaan; 2. Meningkatnya jumlah SKP	34	34	34	34 Provinsi	Kemenpora	Dispora Prov/Kab/Kota
45.	Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Tersusun	Tersusunnya NSPK pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1	1	1	Pusat	Kemenpora	K/L terkait
46.	Provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang	1. Jumlah provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang; 2. Tersusunnya laporan hasil perbaikan	5	5	5	34 Provinsi	Kemenpora	Dispora Prov/Kab/Kota

ekosistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
		ekosistem Kewirausahaan Pemuda						
47.	Badan Usaha Yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	150	150	150	34 Provinsi	Kemensos	Forum CSR
48.	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (Desa)	69	69	69	15 Provinsi	Kementan	Dinas Provinsi
49.	Asuransi Usaha Ternak	Unit	200.000	250.000	280.000	30 Provinsi	Kementan	Dinas Provinsi dan PT. Jasindo

50. Koordinasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
50.	Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS)	Kegiatan koordinasi	16	30	30	4 Provinsi	Kementan	Kemen PPN/ Bappenas, Kemenaker, Kemen KUKM, Pemda, Polbangtan, SMK PP, Himbara, BPD, Perguruan Tinggi, Koperasi, dan Poktan
51.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	Jumlah Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura yang terregistrasi	400	400	400	33 Provinsi	Kementan	Pemda

52. Promosi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
52.	Promosi Usaha dan Investasi KP	Jumlah Promosi Usaha dan Investasi KP	10	10	10	Pusat	KKP	Kemen Investasi/ BKPM, Pemda
53.	Keikutsertaan dalam promosi skala internasional	Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (USD Juta)	300	325	350	5 negara	KKP	Kemenlu, Kemendag, Dinas KP Prov/ Kab/ Kota, Asosiasi, dan Eksportir
54.	NSPK Produksi dan Usaha yang disusun	Jumlah NSPK	4	5	5	Pusat	KKP	Kemen KUKM, Pemda, Perguruan Tinggi

55. Norma . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
55.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah NSPK	3	3	3	Pusat	KKP	Kemen KUKM, Pemda, Perguruan Tinggi
56.	Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat	1.000	1.000	1.000	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda
57.	Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	40	45	50	Pusat	KKP	Kemen KUKM, Dinas Prov/Kab/Kota

58. Kebijakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
58.	Kebijakan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Rencana kerja/ pengelolaan Perhutanan Sosial yang disahkan	400	400	400	33 Provinsi	KLHK	Kemendagri, Kemen KUKM, Kemendes PDTT, BUMN, Kementan, Kemenparekraf/ Baparekraf
59.	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/ LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	40	40	40	33 Provinsi	KLHK	Kemenaker, Kemen KUKM

60. Advokasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
60.	Advokasi Persaingan Usaha ke Badan Usaha	Jumlah Advokasi Persaingan Usaha ke Badan Usaha	10	10	11	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/BKPM, BPS
61.	Advokasi Persaingan Usaha ke Lembaga	Jumlah Advokasi Persaingan Usaha ke Lembaga/ Pemerintah Pusat	6	7	7	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/BKPM, BPS
62.	Pengawasan Persaingan Usaha	Indeks Persaingan Usaha	1	1	1	Jakarta dan Wilayah Kerja	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
						Kantor Wilayah I - VI		Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/ BKPM, BPS
63.	Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	Jumlah Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	11	11	11	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/ BKPM, BPS
64.	Pelaksanaan Monitoring Peringatan Tertulis Pelaksanaan Kemitraan	Jumlah Monitoring Peringatan Tertulis Pelaksanaan Kemitraan	50	5	6	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP,

Kemen Investasi . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> /Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
								Kemen Investasi/ BKPM, BPS
65.	Klarifikasi dan Penelitian Notifikasi Merger dan Akuisisi	Jumlah Klarifikasi dan Penelitian Notifikasi Merger dan Akuisisi	45	25	27	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/ BKPM, BPS
66.	Rekomendasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Usaha dalam PBJP	Jumlah kajian/kebijakan/ rekomendasi yang mendukung perluasan kesempatan usaha bagi PBJP	2	4	4	Pusat	LKPP	K/L/Pemda

67. Pemkab . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
67.	Pemkab/Pemkot yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Tentang PBJP di Desa	Jumlah rancangan dokumen pendampingan penyusunan peraturan bupati/walikota tentang PBJP di Desa	7	7	8	Pusat	LKPP	Pemda
68.	Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan persetujuan pengelolaan Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	40	50	60	Pusat	LKPP	K/L/Pemda



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
69.	Rancangan Norma/Standar/ Peraturan/Model Dokumen/Kajian Tentang Kebijakan PBJP di Desa	Jumlah Rancangan Norma/Standar/ Peraturan/Model Dokumen/Kajian tentang kebijakan PBJP di Desa	1	1	1	Pusat	LKPP	Pemda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

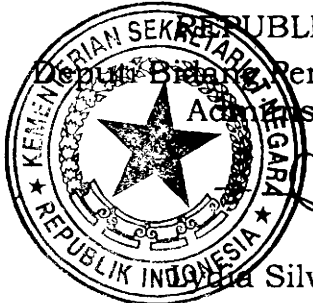
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Yoga Silvanna Djaman

SK No 068661 C